



URGENSI PEMBENTUKAN BADAN SAWIT NASIONAL

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Sawit Indonesia telah berkembang revolusioner, bukan hanya dalam luas perkebunan kelapa sawit saja, tetapi juga Indonesia telah berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Minyak sawit juga berhasil menggeser minyak kedelai sebagai minyak nabati utama dunia. Dengan demikian, Indonesia memegang peran penting bukan hanya pada pasar minyak sawit dunia tetapi dalam pasar minyak nabati dunia. Industri sawit Indonesia yang telah menjadi Mega Agribisnis Sawit Global memerlukan perubahan paradigma, kapasitas dan level pengelolaan kebijakan dari sektoral ke nasional yakni Badan Sawit Nasional. Pembentukan Badan Sawit Nasional tersebut dimaksudkan untuk percepatan pengembangan industri minyak sawit sebagai industri strategis di Indonesia; mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian, daerah dan global; mengurangi lembaga dan beban kementerian serta mengurangi biaya transaksi. Badan Sawit Nasional juga merupakan alat (vehicle) Indonesia untuk merebut dan menjadi pemimpin pasar minyak sawit.

Keywords : Mega Agribisnis Sawit Global, integrasi, Badan Sawit Nasional, industri strategis

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2006 Indonesia telah berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Keberhasilan Indonesia membangun perkebunan sawit khususnya sejak tahun 1980, telah berhasil mengungguli Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Pada saat yang bersamaan, minyak sawit juga berhasil menggeser minyak kedelai sebagai minyak nabati utama dunia. Dengan keberhasilan tersebut, Indonesia memegang peran penting bukan hanya pada pasar minyak sawit dunia tetapi juga pemain penting pada pasar minyak nabati dunia.

Sebagai pemain penting dalam pasar minyak nabati dunia, maka perhatian dunia tertuju pada Indonesia. Kebijakan dan kondisi industri minyak sawit Indonesia menjadi variabel utama dalam analisis pasar minyak nabati dunia. Partisipasi pemain industri minyak nabati dunia dan industri terkait dalam berbagai event internasional di Indonesia seperti *Indonesia Palm Oil Conference* (IPOC) yang makin meningkat dan meluas khususnya dalam lima tahun terakhir, terkait dengan peran penting Indonesia tersebut.

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia seharusnya juga dipahami sebagai pemimpin minyak sawit dunia, pemimpin mata rantai dan tata nilai minyak sawit global. Pemimpin pengetahuan, ilmu dan teknologi minyak sawit, dan pemimpin kebijakan global minyak sawit. Jika Indonesia tidak mampu menempatkan diri sebagai pemimpin industri sawit global, akan diambil alih oleh pihak lain. Fenomena IPOC, RSPO, HCS/HCV yang datangnya dari Barat dan sedang dipaksakan ke Indonesia, merupakan gejala kegagalan Indonesia sebagai pemimpin pasar minyak sawit global.

Masyarakat dunia telah melihat pentingnya industri minyak sawit Indonesia. Sayangnya, Indonesia sendiri belum melihat dan menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia telah menjadi pemain penting dalam pasar minyak sawit bahkan minyak nabati dunia. Industri minyak sawit Indonesia yang telah berkembang menjadi suatu Mega Agribisnis Global, hanya diurus setingkat eselon III/IV Kementerian. Ini

ibarat negara Indonesia hanya diurus oleh organisasi setingkat Bupati atau Camat.

Saatnya Pemerintah dan seluruh *stake holder* bangsa ini sadar akan hal ini. Dalam pasar minyak sawit bahkan nabati dunia, posisi Indonesia sudah lebih besar dari yang kita lihat atau rasakan. Indonesia harus segera merebut itu. Inisiatif DPR-RI yang sedang menyusun RUU Perkelapasawitan, tampaknya telah melihat hal tersebut. Namun belum banyak yang memahami jalan pikiran DPR-RI tersebut sehingga cenderung mempertanyakan bahkan menolak.

MEGA AGIBISNIS GLOBAL

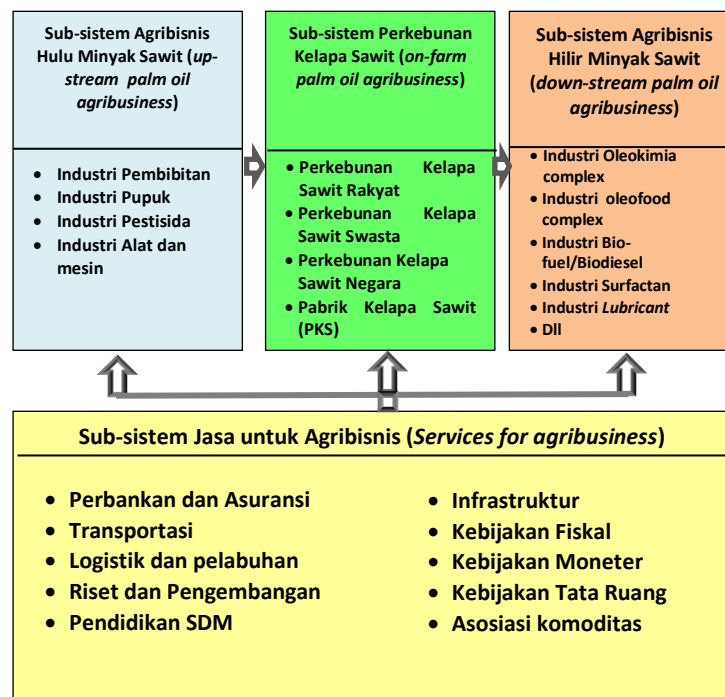
Dalam 15 tahun terakhir ini, kebun sawit Indonesia bukan hanya bertambah luas tetapi juga telah mengalami proses industrialisasi baik ke hulu dan ke hilir, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga sudah ke negara lain. Industrialisasi ke hulu ditandai oleh berkembangnya industri hulu kebun sawit yakni industri pembibitan, industri pupuk, industri pestisida dan industri alat mesin perkebunan sawit. Industri hulu tersebut bukan hanya berkembang di Indonesia namun juga industri sejenis di negara-negara lain telah memasarkan produknya ke perkebunan sawit Indonesia.

Sementara itu, industrialisasi ke hilir ditandai dengan berkembangnya industri-industri yang mengolah CPO menjadi berbagai produk turunan baik untuk tujuan pasar domestik maupun untuk tujuan ekspor. Industri yang dimaksud antara lain industri minyak oleofood, industri oleokimia, industri biodiesel dan lain-lain. Selain berkembang di dalam negeri, industri hilir khususnya dari grup-grup besar juga telah merambah ke negara-negara tujuan ekspor seperti ke Uni Eropa, India, Cina untuk mendekati dan merebut pasar dinegara lain.

Industrialisasi sawit tersebut juga menarik perkembangan sektor jasa-jasa yang terkait dengan industri hulu, perkebunan dan industri hilir sawit. Jasa transportasi, pembiayaan dan asuransi, jasa riset, jasa training, jasa sertifikasi dan lain-lain.

Secara keseluruhan industrialisasi sawit tersebut telah merubah bisnis dan ekonomi sawit, dari hanya bentuk perkebunan sawit menjadi suatu sistem agribisnis bukan hanya

didalam negeri tetapi juga ke dunia internasional sehingga dapat disebut sebagai Mega Agribisnis Sawit Global (Gambar 1).



Gambar 1. Industri Minyak Sawit Sebagai Mega Agribisnis

Pertama, subsistem agribisnis hulu minyak sawit (*up-stream palm oil agribusiness*) yakni seluruh industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal untuk perkebunan kelapa sawit yakni: industri perbenihan/pembibitan kelapa sawit, industri pupuk kelapa sawit, industri pestisida, dan industri alat dan mesin perkebunan.

Kedua, subsistem perkebunan kelapa sawit (*on-farm palm oil agribusiness*) yakni kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit dan pengolahan TBS menjadi minyak sawit (PKS dan PKO) yang menggunakan barang-barang modal untuk menghasilkan minyak sawit (CPO, PKO dan produk lain) dan jasa lingkungan seperti: penyerapan CO², produksi oksigen serta konservasi tanah dan air.

Ketiga, subsistem agribisnis hilir minyak sawit (*down-stream palm oil agribusiness*) yakni industri-industri yang mengolah CPO, PKO dan produk lain menjadi (sampai) produk jadi (*finish product*) beserta pemasarannya seperti oleopangan, oleokimia, biodiesel/biofuel, biosurfaktan, biolubrikan/pelumas, dan lain-lain.

Keempat, subsistem penyedia jasa untuk agribisnis minyak sawit (*services for palm oil agribusiness*) yakni kegiatan industri/lembaga yang menghasilkan/menyediakan jasa bagi agribisnis minyak sawit. Termasuk dalam hal ini industri perbankan, industri transportasi, industri logistik dan pelabuhan, industri/lembaga penelitian dan pengembangan, industri/lembaga pendidikan, kebijakan pemerintah seperti kebijakan tata ruang/pertanahan, fiskal, moneter, infrastruktur, dan lain-lain.

Dari segi ekonomi, subsistem agribisnis hulu, subsistem *on-farm*, subsistem agribisnis hilir dan, penyedia jasa merupakan suatu kesatuan yang integratif sebagai sistem agribisnis minyak sawit. Agribisnis hulu, agribisnis hilir, dan penyedia jasa tidak dapat dipisahkan (*intertwined and inseparably bound together*) dengan usaha perkebunan kelapa sawit (*on-farm*). Hal ini disebabkan agribisnis hulu, agribisnis hilir, dan penyedia jasa tumbuh dan berkembang ditarik oleh perkembangan perkebunan kelapa sawit. Tumbuh berkembangnya agribisnis hulu, hilir, dan penyedia jasa

tersebut merupakan bagian dari proses industrialisasi agribisnis minyak sawit secara keseluruhan.

Pada awal perkembangan, usaha perkebunan kelapa sawit (*on-farm*) menghela/menarik (lokomotif) perkembangan *off-farm* (agribisnis hulu, hilir, dan penyedia jasa) agribisnis minyak sawit (*on-farm leader, off-farm follower*). Sedangkan pada proses industrialisasi lebih lanjut *off-farm* tersebut yang menjadi lokomotif perkembangan *on-farm* agribisnis minyak sawit (*off-farm leader, on-farm follower*). Oleh karena itu, *on-farm* dan *off-farm* agribisnis minyak sawit merupakan satu kesatuan ekonomi.

Dengan lingkup ekonomi agribisnis minyak sawit yang demikian, berimplikasi pada cara melihat dan mengelola pembangunan agribisnis minyak sawit. Untuk melihat agribisnis minyak sawit dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat perkebunan kelapa sawit (*on-farm*) saja, melainkan harus dilihat agribisnis minyak sawit secara keseluruhan yakni agribisnis hulu, usaha perkebunan kelapa sawit, agribisnis hilir, dan penyedia jasa. Jika dilihat hanya parsial (salah satu) akan menyesatkan (*misleading*).

Dalam proses industrialisasi agribisnis minyak sawit, kontribusi nilai tambah (*added value*) pada *off-farm* agribisnis minyak sawit akan semakin besar (baik secara mutlak maupun relatif) dibandingkan dengan kontribusi *on-farm*. Demikian juga dalam kontribusi ekspor, dalam proses industrialisasi agribisnis minyak sawit kontribusi *on-farm* akan makin kecil karena diolah lebih lanjut oleh agribisnis hilir sehingga kontribusi ekspor agribisnis hilir makin besar. Kontribusi yang makin besar pada *off-farm* tersebut hanya mungkin karena didukung perkembangan *on-farm*. Sekali lagi, *on-farm* dan *off-farm* agribisnis minyak sawit tidak dapat dilihat terpisah.

Demikian juga dalam pengelolaan (kebijakan makro ekonomi), *on-farm* dan *off-farm* tersebut harus dilihat dalam satu sistem agribisnis minyak sawit, sebagai satu unit analisis dan sasaran kebijakan makro ekonomi. Kebijakan fiskal, misalnya Kebijakan Perpajakan (PPn) pada agribisnis hulu dan pada *on-farm* akan menjadi biaya bagi perkebunan kelapa sawit dan agribisnis hilir

melalui proses marginalisasi ganda (*double marginalization*). Hal yang sama juga, kebijakan pajak ekspor CPO dengan maksud mendorong pengembangan agribisnis hilir, akan menimbulkan kerugian dan pengurangan gairah berproduksi para petani pada *on-farm*. Bahkan kebijakan tersebut potensial mendorong penyelundupan (*smuggling*) CPO akibat disparitas harga CPO domestik dengan internasional.

Kebijakan ekonomi yang demikian dimana disatu sisi menciptakan pesimistis dan dipihak lain optimistis dalam agribisnis minyak sawit, terjadi akibat melihat agribisnis minyak sawit secara tersekat-sekat (parsial). Oleh sebab itu, dalam perumusan kebijakan perlu dilihat secara integratif yakni *on-farm* dan *off-farm* dilihat dalam satu unit analisis yakni agribisnis minyak sawit. Kebijakan integratif yang dimaksud adalah **kebijakan nasional agribisnis sawit** bukan kebijakan nasional pada/di agribisnis sawit. Kebijakan nasional agribisnis sawit yang dimaksud mengintegrasikan kebijakan fiskal, moneter, kelembagaan lintas kementerian/lembaga sebagai respon dan mempengaruhi kebijakan negara importir/eksportir maupun pasar minyak nabati global.

PERLUNYA BADAN SAWIT NASIONAL

Perkembangan industri sawit Indonesia yang telah menjadi Mega Agribisnis Sawit Global memerlukan perubahan paradigma dan level pengelolaan kebijakan. Mega Agribisnis Sawit Global memerlukan pengelolaan bukan hanya lintas kementerian, daerah, tetapi juga terkait dengan internasional. Mega Agribisnis Sawit Global yang demikian tidak cukup lagi dikelola oleh Eselon III/IV kementerian seperti selama ini, bahkan tidak cukup lagi dikelola oleh berbagai kementerian. Mega Agribisnis Sawit Global memerlukan organisasi pengelolaan pembangunan level nasional langsung di bawah Presiden yakni (sementara disebut) Badan Sawit Nasional.

Selain tuntutan perkembangan industri sawit nasional, yang telah dikemukakan sebelumnya urgensi pembentukan Badan Sawit Nasional juga didasarkan pada alasan berikut :

Pertama, industri minyak sawit merupakan industri strategis di Indonesia, bukan hanya sektor ekonomi biasa melainkan menyangkut bagian dari sistem kedaulatan/ketahanan pangan, sistem kedaulatan/ketahanan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup (penyerapan karbon dan produksi oksigen) dan pembangunan pedesaan.

Agribisnis sawit nasional berperan : (1) penyumbang devisa (net ekspor) terbesar dalam perekonomian nasional yakni rata-rata USD 20 milyar per tahun, (2) merupakan penghasil energi baru terbarukan (biodiesel, biopremium, biogas, biolistrik). Biodiesel sebagai pengganti solar impor (subsitusi impor) yang dapat menghemat devisa impor solar dan menghemat emisi, (3) perkebunan kelapa sawit berada pada 190 kabupaten dimana

45% adalah perkebunan sawit rakyat yang merupakan sektor ekonomi penting baik bagi pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan pendapatan petani maupun pengurangan kemiskinan, (4) industri hilirnya (industri oleofood, oleokimia, biodiesel) dan perdagangan berada di seluruh provinsi yang menyediakan bahan pangan, kebutuhan masyarakat lainnya (sabun, detergen, sampo, pasta gigi, dan lain-lain), (5) industri minyak sawit merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional yang menarik pertumbuhan 10 sektor ekonomi utama dalam perekonomian nasional, dan (6) perkebunan kelapa sawit dengan luas 10 juta hektar dan tersebar pada 190 kabupaten berfungsi "paru-paru" yang menyerap karbondioksida (polusi) dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan.

Tabel 1. Industri dan Lembaga Penyedia Jasa Bagi Agribisnis Minyak Sawit

Industri/ Lembaga	Jasa yang Dihasilkan/Disediakan
Kementerian Pertanian	Perizinan peredaran benih, pupuk pestisida, alat/mesin perkebunan; jasa karantina, perizinan usaha perkebunan; <i>public goods</i> (pelestarian varietas kelapa sawit, pemberantasan/ persendialian hama dan penyakit kelapa sawit yang bersifat endemik), R&D, pendidikan petani, bantuan modal petani, dan sertifikasi berkelanjutan.
Kementerian Perindustrian	Perizinan industri, kebijakan industri R&D dan pelatihan SDM industri, dan lain-lain
Kementerian Perdagangan	Perizinan usaha perdagangan, kebijakan perdagangan domestik dan internasional, Pengembangan bursa CPO, dan lain-lain
Kementerian Keuangan	Kebijakan fiskal (subsidi, pajak), kebijakan lembaga keuangan non bank, kebijakan asuransi, dan lain-lain
Kementerian Hukum dan HAM	<i>Public goods</i> , (menciptakan kepastian hukum khususnya dalam berusaha agribisnis minyak sawit), dan lain-lain
	<i>Public goods</i> (kepastian dan penegakan hukum)
Kementerian Pertahanan, Polri	<i>Public goods</i> (jaminan keamanan berusaha dan penegakan hukum)
Kementerian Perhubungan	Regulasi dan kebijakan transportasi darat, laut, udara
Kementerian PU	Penyediaan sarana jalan, sarana pelabuhan, pengairan/irigasi
Kementerian Koperasi & UKM	Regulasi kebijakan dan pembinaan koperasi dan UKM
Bank Indonesia	Kebijakan Moneter (suku bunga, kurs) dan Perbankan
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Regulasi kehutanan dan kebijakan lingkungan hidup
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Regulasi pertanahan dan kebijakan tata guna ruang
Kementerian BUMN	Regulasi dan kebijakan BUMN perkebunan kelapa sawit, BUMN jasa transportasi dan pelabuhan, BUMN jasa keuangan bank dan non bank, dan lain-lain
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kebijakan ketenagakerjaan, sertifikasi profesi dan pengembangan wilayah transmigrasi
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek	Pendidikan dan pelatihan SDM agribisnis minyak sawit, kebijakan R&D agribisnis minyak sawit
Pemerintah Provinsi (Eksekutif, Legislatif)	Regulasi dan perizinan sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang dan Peraturan, tata ruang provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota (Eksekutif, Legislatif)	Regulasi dan perizinan didalam kabupaten/kota sesuai kewenangan yang ditetapkan, undang-undang/peraturan, dan tata ruang kabupaten/kota

Kedua, saat ini Mega Agribisnis Sawit Global Indonesia ditangani oleh banyak kementerian/lembaga pemerintah (Tabel 1). Mulai dari lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing industri/lembaga penyedia jasa menghasilkan/menyediakan jasa yang spesifik bagi agribisnis minyak sawit.

Banyaknya lembaga pemerintah yang menangani Mega Agribisnis Sawit Global Indonesia tersebut, justru membuat agribisnis sawit tersekat-sekat dan dalam prakteknya kebijakan yang dikeluarkan masing-masing kementerian tak jarang saling bertentangan karena didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Badan Sawit Nasional dimaksudkan untuk menyatukan kebijakan tersebut mulai dari perencanaan hingga dalam eksekusi kebijakan.

Ketiga, Badan Sawit Nasional merupakan alat (*vehicle*) Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar minyak sawit global. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia seharusnya Indonesia menjadi acuan/*leading* dalam tata nilai sawit global, tata kelola sawit global, standarisasi sawit global, informasi pasar dan ilmu dan teknologi terkait sawit global. Dengan kata lain, seharusnya "irama gendang" Indonesia lah yang diperdengarkan dan "ditarikan" pelaku pasar produk sawit global. Bukan seperti saat ini yakni justru Indonesia "menari" dengan "irama gendang" Barat, padahal Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia. Hal yang demikian terjadi karena terjebak dalam perangkat banyak kementerian yang menangani sawit yang dalam kenyataannya tak satupun kementerian yang fokus dan cukup kuat menangani sawit. Oleh karena itu dengan adanya Badan Sawit Nasional diharapkan masalah tersebut tidak terjadi lagi.

Keempat, Badan Sawit Nasional justru akan mengurangi lembaga dan beban kementerian. Lembaga spesifik sawit seperti Komite ISPO (Kementerian Pertanian), Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (Kementerian Keuangan), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) akan dilebur ke dalam Badan Sawit Nasional tersebut.

Demikian juga pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan bibit kelapa sawit (Kementerian Pertanian), industri pengolahan minyak sawit (Kementerian Perindustrian) dan unit-unit lain terkait sawit di kementerian akan berkurang dan dilebur ke dalam Badan Sawit Nasional.

Selain mengurangi lembaga dan beban kementerian tersebut adanya Badan Sawit Nasional juga memberi manfaat bagi publik seperti pelayanan perizinan satu atap dengan cepat, promosi dan pengembangan pasar ke berbagai negara yang fokus, statistik terkait industri sawit yang terintegrasi dan akurat, pelayanan pembinaan kepada sawit rakyat yang cepat dan tuntas, R&D yang terintegrasi, dan lain-lain.

Kebutuhan lembaga level nasional seperti Badan Sawit Nasional sesungguhnya bukan hal yang luar biasa. Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sebelum tahun 2006 juga melakukan langkah yang sama dengan mendirikan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) yang mengintegrasikan seluruh lembaga-lembaga pemerintah yang terkait industri sawit. Kemajuan Malaysia yang mampu menguasai pasar dunia, menjadi referensi harga CPO dunia dan produk turunannya dan menjadi referensi ilmu dan teknologi terkait industri sawit dunia, merupakan kontribusi dari MPOB.

KESIMPULAN

Sawit Indonesia telah berkembang revolusioner, bukan hanya dalam luas perkebunan kelapa sawit saja, tetapi juga Indonesia telah berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Minyak sawit juga berhasil menggeser minyak kedelai sebagai minyak nabati utama dunia. Dengan demikian, Indonesia memegang peran penting bukan hanya pada pasar minyak sawit dunia tetapi dalam pasar minyak nabati dunia.

Perkembangan industri sawit Indonesia yang telah menjadi Mega Agribisnis Sawit Global memerlukan perubahan paradigma dan level pengelolaan kebijakan. Mega Agribisnis Sawit Global Indonesia memerlukan pengelolaan bukan hanya lintas

kementerian, akan tetapi memerlukan organisasi pengelolaan pembangunan level nasional langsung di bawah Presiden yakni (sementara disebut) Badan Sawit Nasional.

Selain tuntutan perkembangan industri sawit nasional, urgensi pembentukan Badan Sawit Nasional juga didasarkan pada (1) industri minyak sawit merupakan industri strategis di Indonesia (2) saat ini Mega Agribisnis Sawit Global Indonesia ditangani oleh banyak kementerian/lembaga pemerintah (3) Badan Sawit Nasional merupakan alat (*vehicle*) Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar minyak sawit global dan (4) Badan Sawit Nasional justru akan mengurangi lembaga dan beban kementerian, mengurangi biaya transaksi kelembagaan serta mengintegrasikan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, P.J, S.T Sonka, and K Lajili. 1992. *Vertical Coordination, Financial Structure and The Changing Theory of The Firms*. American Journal of Agricultural Economics, 74 (5): 1219-1225.
- Carlton DW. 1979. *Vertical Integration in Competitive Market Under Certainty*. Journal of Industrial Economics 27: 189-209.
- McCorrison, S.1996. *Economics of Vertical Market Competition*. England. UK
- Simatupang P. 1995. *Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi*. Orasi APU Puslit Sosek. Balitbang. Deptan. Bogor.
- Sipayung. T dan JHV. Purba, 2015. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). Bogor.

